

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di instansi pemerintahan.

Penerapan basis akrual pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah

haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu, Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, antara lain faktor sumber daya manusia, komitmen organisasi dan tingkat teknologi informasi.

Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Akuntansi berbasis akrual dianggap dapat memberikan informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka selain kemampuan menerapkan aturan-aturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan lainnya diperlukan kualitas sumber

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Pemerintahan wajib memiliki sumber daya manusia yang berkompoten di bidang keuangan dan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Sumber daya merupakan pilar dan penggerak roda organisasi dalam mencapai tujuan organisasi oleh karena itu semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin siap pula sumber daya manusia tersebut untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Sutrisna et al., 2021). Karena itu harus dipastikan pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat laporan keuangan pemerintah lebih transparan dan memiliki akuntabilitas. Penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan memiliki beberapa rintangan yaitu: 1. Teknologi Informasi berbasis sistem dan sistem akuntansi 2. Pemimpin yang bertanggung jawab, 3. Adanya Sumber Daya Manusia yang profesional 4. Pengaruh pada perpindahan dengan keterlambatan merancang aplikasi khusus untuk sistem akuntansi berbasis akrual.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, yaitu (Surya & Asiyah, 2020). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Masih sedikitnya penelitian tersebut dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua).

Beberapa Negara yang menerapkan standar akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala yang dihadapi pada tahap awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Di Negara Malaysia, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk kursus yang mengarah pada keahlian akuntansi profesional. Berbeda dengan

Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor, pemerintah, dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan . Namun, pada penelitian pulau Fiji ada ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Fiji.

Persiapan penerapan akuntansi akrual di Hong Kong telah dimulai sejak tahun 2003 dan 2004. Dengan diberlakukannya sistem yang baru ini, masalah yang dihadapi kemudian adalah sistem akuntansi akrual yang akan memberikan dampak yaitu faktor-faktor yang memengaruhi sangat besar terhadap sistem, pelaksana, dan budaya yang telah berjalan sejak lama. Penerapan sistem yang baru tersebut tentunya akan membutuhkan biaya yang secara signifikan cukup besar, baik untuk menyiapkan hardware maupun software yang akan digunakan.

Untuk pelaksana, tentunya akan tidak mudah dan cepat dalam menyiapkan para akuntan pemerintah agar dapat memahami sistem akrual dengan baik. Sedangkan dampak terhadap budaya, tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap budaya di hampir seluruh instansi pemerintah karena selama ini instansi-instansi tersebut bekerja layaknya pusat biaya. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publiknya.

Tingkat perubahan (*the degree of change*) dalam manajemen sektor publik di Selandia Baru dilalui dengan cepat dan sangat inovatif. Pemerintah mereformasi hampir di semua lini pemerintahan, mulai dari pelaksana (para pejabat pengelola keuangan dan akuntan negara), sistem yang digunakan, hingga ke budaya yang dianut di setiap lembaga negara, yang dituangkan dalam *Public Finance Act* 1989 (Ghulam, 2013).

Beberapa akademisi dan peneliti telah melakukan penelitian mengenai kesiapan pemerintah terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah. Ardiansyah (2011) dan Rahmayati (2012) meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pelaporan pemerintahan studi kasus pada KPPN Malang. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1 (2015): 14-32 18 manusia dan hubungan komunikasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual. Namun tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius

menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Karena sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Adanya kelemahan di beberapa kementerian ialah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja.

Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi yang terdiri dari *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Beberapa penelitian terdahulu, terdapat berapa faktor yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual yaitu sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif sertadapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Pengertian kedua, SDM berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja bisa diartikan mampu melakukan segala kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fiko Ismet, (2018) menyatakan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif pada Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Hal ini disebabkan oleh SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan penerapan menunjukkan pelatihan yang cukup memadai dan memiliki dampak yang baik terhadap keberhasilan dalam pengadopsian sistem akuntansi.

Penelitian dilakukan juga oleh (Khosakiyah et al., 2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan standar akuntansi berbasis akrua. Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan Penerapan standar akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Kurniawan (2018), dimana SDM tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh Purwaningrum (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Jantong, dkk (2018) yang menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Menurut Azhar Arsyad, (2015), komitmen merupakan bagian yang terkait dengan kinerja karyawan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, dalam arti keinginan untuk melaksanakan tugas dalam hal pengelolaan keuangan daerah walaupun peraturan keuangan daerah sering berubah ubah. Dalam Karyogis & I MadePande Dwiana Putra (2017) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu.

Penelitian Ismet (2018) dan Erawati & Kurniawan (2018), menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual, hal ini disebabkan oleh pegawai dan atasan yang memiliki komitmen yang baik terhadap organisasi dalam mengemban tugasnya yaitu menyajikan laporan keuangan yang andal tepat waktu. Atasan telah melakukan sosialisasi yang baik terhadap bawahannya terkait perubahan peraturan yang ada di pemerintahan

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zalni et al., 2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual hal ini disebabkan oleh penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya, Hal ini menandakan belum terdapat komitmen organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual.

Menurut Rintho (2018:3) pengertian teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengelolaan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Menurut Romney & Steinbart (2016:4) mendefinisikan teknologi informasi merupakan komputer dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan dan memanipulasi data. Prasarana tersebut adalah sistem dan metode yang digunakan untuk beberapa tahapan. Seperti memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan serta menggunakan data secara bermakna.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustia Rananda, (2020) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Hal ini disebabkan bahwa teknologi informasi merupakan sarana pendukung atas tujuan organisasi. Apabila kualitas teknologi informasi yang mempunyai keterbatasan data seperti ketidak mampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat dan

up-to-date, secara efektif maka menjadi hambatan utama untuk melaksanakan system akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ismet, 2018) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual teknologi informasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang menunjang pegawai dalam kinerjanya sangat membantu agar mencapai hasil yang maksimal. Pegawai dapat menggunakan dan memanfaatkan perangkat yang ada tersebut dengan baik serta perangkat keras yang digunakan tersebut telah didukung dengan perangkat lunak yang terbaru yang semakin memudahkan pegawai dalam pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, dan sesuai pengamatan peneliti terhadap Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jendral Kemendikbudristek, terdapat beberapa masalah antara lain adanya pegawai yang kurang pemahaman tentang komponenen dalam laporan keuangan, pemahaman tentang pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, kurangnya pengetahuan, perilaku, sikap, komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, komitmen normative, perangkat keras komputer hardware, perangkat lunak komputer software, jaringan dan komunikasi. Permasalahan ini akan berpengaruh terhadap kinerja Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek, pada khususnya terkait penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Jadi beberapa faktor yang diyakini dapat berpengaruh pada

penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi berdampak pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1.2 Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ?
- b. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?
- c. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang sesungguhnya dan terpercaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jendral Kemendikbudristek. Secara spesifik tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui pengaruh:

- a. Sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

- b. Komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
- c. Teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori kebijakan Publik, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dimana masyarakat ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas pemerintahan, yang terkait dengan laporan keuangan berbasis akrual. Hal tersebut dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh karyawan Biro Keuangan dan BMN yang dapat dipergunakan sebaik mungkin kepada publik. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat mendukung teori implementasi publik dimana terdapat penjelasan tentang perilaku yang berhubungan dengan karakteristik dan sikap karyawan dalam menjalankan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa biro Keuangan dan BMN Sekjen Kemendikbudristek sudah menjalani SAP berbasis akrual dengan baik atau belum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan motivasi bagi pegawai Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek dalam melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan keuangan Kemendikbudristek sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan bagi Biro Keuangan dan BMN Kemendikbudristek dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

